

Daftar Pustaka

- Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/16>.
- Al Amin, Ahmat Yusuf, dan Arif Wibowo. "Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (Februari 2023). <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.111>.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Azzahrawi, Husni Djalil, dan Zahratul Idami. "Wewenang dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12189>.
- Baherman, B. "Tinjauan yuridis terhadap upaya administratif sebagai syarat formal pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara (study analisis peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif)." 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29300/QYS.V5I2.3751>.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.

- Berge, J. B. J. M. ten, dan A. Q. C. Tak. *Hoofdlijnen van het Nederlands Administratief Procesrecht*. Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink, 1987.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- _____. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Ilham, Ach. Nadzirun, Abid Zamzami, dan Ahmad Bastomi. “Peran PTUN sebagai Perlindungan Hukum kepada Masyarakat Atas Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Dinamika* 28, no. 9 (2022). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14821>.
- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang.
- Kimberly, Vanessa Louise, dan Anya Sitara Budidarsono. “Peran PTUN dalam Mewujudkan Good Governance.” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (April 2025). <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5952>.
- Lincoln, Abraham. “Gettysburg Address.”
- Lotulung, Paulus Effendi. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 1986.
- Marbun, S. F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UI Press, 2011.

- _____. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/TUN/TF/2024.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 10/G/2024/PTUN.SMG.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administratif dan Peradilan Administratif*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Safitri, Erna Dwi, dan Nabitatus Sa'adah. "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 31, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14710/jphi.v31i1.34-45>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020.
- Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Van Wijk, H. D. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV, 1995.

Wangge, Mario Viano Rasi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Intervensi dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (Juni 2021). <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3325.300-305>.

Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wuisang, Ari, dan Roby Satya Nugraha. “Problematika Perluasan Makna Keputusan Administrasi Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Palar (Pakuan Law Review)* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.